



## PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE

Karina Hifnalisa

Universitas Padjadjaran  
[karinhifnalisa@gmail.com](mailto:karinhifnalisa@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Capital Intensity, Koneksi Politik, dan Tax Avoidance*

Tindakan *tax avoidance* oleh wajib pajak dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan diantara pemerintah dan wajib pajak dengan cara pemanfaatan celah pada undang-undang perpajakan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh *capital intensity* serta koneksi politik pada *tax avoidance*. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yakni perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Teknik penelitian sampel menggunakan *purposive sampling* dengan sampel yang dihasilkan sejumlah 14 perusahaan. Metode analisis yang digunakan yakni pengujian statistik deskriptif serta regresi linier sederhana dengan program IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* serta koneksi politik secara signifikan berpengaruh pada *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2018..

### ABSTRACT

**Keywords:**  
*Capital Intensity, Political Connection, and Tax Avoidance*

*Tax avoidance actions by taxpayers can occur for different interests between the government and taxpayers by exploiting loopholes in the tax law and several factors that influence it. The purpose of this study was to determine the impact of capital intensity and political connections on tax avoidance. The population used in this survey are state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015 to 2018. The sample research technique used purposive sampling with the resulting sample of 14 companies. Descriptive statistical tests and simple linear regression by the IBM SPSS Statistics 20 program are used as the analysis method. The results show that capital intensity and political connections have a significant impact on tax avoidance for BUMN companies listed in IDX 2015-2018.*

### PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendanaan terpenting bagi perekonomian Indonesia berasal dari pajak. Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya menggunakan dana pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan fasilitas umum, aset publik, serta pembangunan infrastruktur (Lanis & Richardson, 2013). Kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan dapat diwujudkan dengan menggali sumber pendanaan dari pajak. Oleh karena itu pemerintah Indonesia semakin gencar dalam pengoptimalisasian pajak dari tahun ke tahun. Sistem perpajakan terus diperbaiki pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan negara serta peningkatan *tax ratio* secara bertahap. Pelaksanaan peningkatan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan

bertahap dimana kondisi perekonomian Indonesia dan dunia harus diperhatikan (Waluyo, 2017).

Perusahaan adalah wajib pajak badan yang berkewajiban membayar pajak bagi negara sesuai undang-undang yang mengaturnya. Tingginya laba bersih yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan pendapatan negara atas pajak, begitu juga sebaliknya (Purwanggono & Rohman, 2015). Namun pada kenyataannya masih banyak kewajiban pajak yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Adanya dilemma bagi manajemen serta *stakeholder* perusahaan dikarenakan pendapatan perusahaan secara langsung dikurangi oleh beban pajak. Pajak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jika penghasilan yang didapatkan semakin besar artinya beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar, sehingga beban pajak akan dikelola perusahaan supaya pendapatan tetap maksimal (Lanis & Richardson, 2013). Hal ini bertentangan dengan pemerintah yang memiliki tujuan pengoptimalisasian pendapatan pajak dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat. Adapun usaha pengurangan pembayaran pajak dinamakan *tax avoidance*. Jika perusahaan banyak yang melakukan *tax avoidance* maka akan sulit memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang seharusnya diperoleh.

*Tax avoidance* ialah upaya penghindaran pajak yang berdampak pada kewajiban pajaknya namun tidak melanggar ketentuan perpajakan yang masih berlaku. Kelemahan dalam UU serta aturan perpajakan dimanfaatkan dalam meminimalkan jumlah pajak terutang sehingga transaksi yang dibebankan dengan beban pajak tidak ada. Permasalahan *tax avoidance* sangatlah rumit serta unik karena di satu sisi hal ini legal, namun disisi lain pemerintah tidak menginginkannya.

Ada beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh pada *tax avoidance*, diantaranya adalah koneksi politik serta *capital intensity*. Adanya koneksi politik membuat perusahaan diperlakukan khusus serta rendahnya risiko dalam pemeriksaan pajak yang menjadikan semakin agresifnya suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* ialah investasi dari sebuah perusahaan pada aset tetap yang bisa menilai besarnya modal yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan dalam mengambil pasar yang diinginkan. Tingkat beban pajak yang harus dibayarkan pemerintah akan dipengaruhi oleh biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap.

Beberapa perusahaan BUMN di Indonesia melakukan usaha dalam mengurangi beban pajak yang tidak mengarah pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan BUMN pada hakikatnya ikut berkontribusi untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembayaran pajak. Namun menurut G.T. Suroso, Widyaiswara BPPK mengatakan dari seratus lebih BUMN yang ada di Indonesia, tetapi masih jauh signifikan persentasenya dalam memberikan sumbangan pendapatan negara melalui pajak. Adanya indikasi bahwa perusahaan BUMN memperoleh pemeriksaan pajak yang rendah atas koneksi politik yang dimiliki sehingga pemeriksa pajak yakin bahwasanya perusahaan yang berada dibawah pengawasan pemerintah pasti baik operasionalnya dan hal tersebut mempengaruhi tingkat *tax avoidance*.

Kasus *tax avoidance* yang melibatkan beberapa perusahaan di Indonesia berakibat pada berkurangnya pemasukan pajak yang negara terima. Contoh kasus *tax avoidance* ada pada perusahaan BUMN terafiliasi di Singapura bidang jasa kesehatan, yaitu PT RNI yang diduga melaksanakan tindakan *tax avoidance*. PT RNI terdaftar sebagai perseroan terbatas secara badan usaha, namun bergantung pada utang afiliasi dari segi permodalan. Hal ini berarti pinjaman diberikan kepada RNI di Indonesia oleh pemilik di Singapura. Jadi modal tidak ditanamkan pemiliknya tetapi seolah-olah menjadikannya sebagai

hutang, sehingga pemilik di Singapura menganggap dan mengakui dividen ketika hutang dan bunganya dibayarkan sebab modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan. Tercatat utang RNI pada 2014 sebesar Rp.20,4 miliar serta omzet Rp.2,178 miliar. Belum lagi di tahun yang sama pada pelaporan terdapat kerugian di tahan sebesar Rp.26,12 miliar. Kemudian terdapat SPT pajak yang tidak dilaporkan dua pemegang saham RNI berkewargaan Indonesia dari 2007-2015 secara benar. (Suryowati, 2016).

Fenomena *tax avoidance* juga dialami PT Garuda Metalindo yang terlihat dari peningkatan hutang dari Rp 48 miliar pada akhir desember 2015 hingga Rp 200 miliar pada Juni 2016. Modal dimanfaatkan emiten dengan kode saham BOLT ini yang didapatkan dari utang guna terhindar dari pembayaran pajak. Ervin Wijaya selaku Presiden Direktur menjabarkan, peningkatan nilai hutang akibat Rp 350 miliar belanja modal yang disiapkan sampai pertengahan tahun depan. Dana capex bersumber dari pinjaman perbankan senilai Rp 200 miliar kemudian selebihnya kas internal perusahaan akan diambil. Perusahaan diduga menghindari pembayaran pajaknya, padahal aktivitasnya di Indonesia cukup banyak. Hampir sama seperti PT RNI, PT Garuda Metalindo telah menjadi perseroan terbatas karena sudah terdaftar, namun perusahaan tersebut juga bergantung dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dapat mengurangi pajak sehingga bisa terhindar dari kewajiban pajaknya (Widodo, 2020).

Penelitian tentang pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance* oleh Ajeng Wijayanti (2016), Muadz Rizki Muzakki (2015), dan Dimas Anindyka S. (2018) menghasilkan bahwa *capital intensity* secara signifikan berpengaruh pada *tax avoidance*, sementara penelitian Nurrahma Dewi (2016), I Putu Putra Wiguna (2017), dan A. A Ayu Nur Cintya Apsari (2018) menghasilkan bahwasanya *capital intensity* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Hasil penelitian Ronald Tehupuring (2016) dan Stella Butje (2013) mengenai pengaruh koneksi politik pada *tax avoidance* menguraikan bahwasanya koneksi politik secara signifikan berpengaruh pada *tax avoidance*, sementara hasil penelitian Melisa Fadhila (2017) serta A. A Ayu Cintya Apsari (2018) menguraikan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Beberapa penelitian memberikan hasil yang tidak konsisten, maka dari itu penelitian lebih lanjut sangat diperlukan guna memprediksi serta memperjelas apakah *capital intensity* serta koneksi politik berpengaruh pada *tax avoidance* di Perusahaan BUMN pada periode 2015-2018. Selain itu penelitian ini bertujuan guna mengetahui apakah terdapat pengaruh *capital intensity* dan koneksi politik secara parsial pada *tax avoidance*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***Tax Avoidance***

Upaya mengurangi beban pajak yang marak dilakukan perusahaan dengan masih dalam lingkup peraturan perpajakan disebut *tax avoidance* (Sukartha, 2018). Meski *tax avoidance* memiliki sifat legal, hal tersebut tetap tidak diinginkan pihak pemerintah. Kurniasih & Ratna Sari (2013) menjabarkan *tax avoidance* bisa dilakukan dengan: (1) ketentuan anti *tax avoidance* atas *controlled foreign corporation*, *treaty shopping*, *thin capitalization*, dan transaksi *transfer pricing* serta transaksi yang tidak substansi bisnis; (2) usaha *tax avoidance* dengan substansi ekonomi yang dipertahankan dari transaksi dengan pemberian formal yang beban pajaknya diberikan yang paling rendah; (3) subjek pajak dipindahkan ke negara yang pajaknya mendapat perlakuan khusus (*tax haven country*). Tidak semua tindakan penghindaran pajak melanggar aturan, namun

banyak perusahaan diasumsikan lebih agresif terhadap pajak dengan metode - metode yang digunakan. Hal ini juga dikemukakan Lanis & Richardson, (2013) bahwa *tax avoidance* meliputi kegiatan perencanaan pajak yang legal, namun beberapa metode cenderung abu-abu dan dapat dikatakan kegiatan yang illegal.

### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Kegiatan investasi oleh perusahaan yang berhubungan dengan investasi berbentuk aset tetap disebut *capital intensity*. Intensitas modal bisa menjelaskan efisiensi perusahaan dalam mempergunakan aktivitya untuk memperoleh pendapatan (Ardyansah, 2014). *Capital intensity* menurut Noor dkk., (2010) ialah rasio aset tetap seperti properti, mesin, dan peralatan dibandingkan dengan total aset. Sama dengan pernyataan Hanum & Zulaikha (2013) bahwa pengukuran intensitas modal dengan mengetahui besarnya aset tetap yang dipakai perusahaan dibanding dengan jumlah aset yang perusahaan miliki.

Indikator prospek perusahaan di masa depan guna menilai intensitas modal salah satunya yaitu dengan melihat besarnya modal yang diperlukan dalam menghasilkan pendapatan untuk mengambil alih pasar yang diinginkan. *Capital intensity* suatu perusahaan yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) mengenai Pajak Penghasilan menjabarkan “penyusutan atas pengeluaran untuk mendapatkan harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto”. Menurut Andhary (2017) total aset tetap perusahaan yang makin besar maka beban depresiasinya makin besar pula sehingga menyebabkan laba sebelum pajak menjadi kecil. Hal tersebut akan berdampak pada penghasilan kena pajak yang berubah lebih kecil serta akan lebih rendah dalam membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan yang didapatkan dari depresiasi aset tetap yang bisa menjadikan beban pajak perusahaan rendah. Wiguna & Jati (2017) juga menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan yang dimiliki perusahaan akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga beban pajak yang harus dibayar juga meningkat. Namun karena terdapat potensi beban pajak yang tinggi maka manajemen akan mencari cara untuk menekan biaya beban pajak tersebut. Tingginya *capital intensity* perusahaan berakibat pada rendahnya efektifitas pajak, hal tersebut akan membuat perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Anindyka dkk. (2018) dan Muzakki & Darsono (2015) menemukan *capital intensity* berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

**H<sub>1</sub> : “*Capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”**

### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

Adanya suatu hubungan antara kedua pihak yang berkepentingan dalam bidang politik guna tercapainya suatu hal yang saling menguntungkan disebut koneksi politik (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan akan mendapat perlindungan dari pemerintah dan rendahnya risiko pemeriksaan pajak dengan mempunyai koneksi politik sehingga perusahaan bisa semakin agresif dalam pelaksanaan *tax avoidance* (Butje & Tjondro, 2014). Faccio (2006) menyatakan bahwasanya koneksi secara politik dianggap ada di suatu perusahaan apabila setidaknya seseorang sebagai pengendali memiliki 10% dari jumlah keseluruhan saham dan salah satu pimpinan perusahaan seperti ketua, wakil CEO ialah orang yang berhubungan dengan politikus, anggota parlemen, atau menteri. Adhikari dkk. (2006) berpendapat bahwa kepemilikan secara langsung oleh pemerintah pada suatu perusahaan dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki koneksi politik.

Pada penelitian ini kepemilikan saham pemerintah diproksikan untuk mengetahui tingkat koneksi politik pada perusahaan yang diteliti. Kepemilikan saham pemerintah yang semakin tinggi pada suatu perusahaan akan membuat tekanan yang diberikan pihak institusi pada manajemen semakin tinggi dalam hal peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini akan membuat perusahaan berkeinginan untuk meningkatkan laba sehingga *tax avoidance* yang dilakukan kemungkinannya juga semakin tinggi (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Hasil penelitian Butje & Tjondro (2014) serta Tehupuring & Rossa (2016) menyatakan koneksi politik secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*.

**H<sub>2</sub> : “Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”**

## METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk melihat bagaimana *tax avoidance*, *capital intensity* serta koneksi politik pada unit analisis yang dipilih. Sumber penelitian ini adalah data sekunder pada website BEI. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018 sejumlah 20 perusahaan. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan terdapat kriteria diantaranya perusahaan BUMN yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2015-2018 secara konsisten serta perusahaan yang mempunyai keuntungan sebelum pajak positif.

Metode analisis penelitian menggunakan uji asumsi klasik autokorelasi, multikolinearitas, normalitas serta heteroskedastisitas dan selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, analisis korelasi, koefisien determinasi serta analisis regresi linier sederhana. Persamaan analisis regresi linier sederhana dapat dituliskan:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = variabel terikat

X = nilai variabel bebas

a = konstanta atau bila X = 0

b = koefisien regresi

Peneliti menggunakan uji hipotesis yakni uji t, yang mana merupakan uji secara parsial pada koefisien regresi. Tujuan penelitian ini guna melihat signifikansi peran antar variabel bebas pada variabel terikat secara parsial dengan berasumsi bahwasanya variabel bebas lain dianggap tetap. Uji ini menggunakan t hitung dan hasil perhitungannya dibanding dengan t tabel tingkat kesalahan 0,05.

Perhitungan *tax avoidance* menurut Dyreng dkk., (2010) diukur dengan CETR yaitu pengeluaran kas untuk beban pajak perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Persentase CETR yang lebih besar dari 25% mengindikasikan tingkat *tax avoidance* yang rendah, begitupun sebaliknya. CETR dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

*Capital intensity* menguraikan besarnya perusahaan dalam berinvestasi pada aset. *Capital Intensity* sebagai variabel independen menurut Siregar (2016) diukur dengan rasio perbandingan total aset tetap dengan total aset dirumuskan sebagai berikut:

$$Capital Intensity = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Koneksi politik sebagai variabel independen diproksikan dengan kepemilikan saham pemerintah. Besarnya kepemilikan tersebut menurut Tehranian et al. (2011)

pengukurannya dari rasio total saham yang pemerintah miliki terhadap jumlah keseluruhan saham yang ada di perusahaan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Saham Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah Saham Pemerintah}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

## PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengumpulkan data observasi sejumlah 56 data dari 14 perusahaan yang diteliti pada penelitian ini. Analisis tersebut tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1** Analisis Deskriptif

Ket	CETR	CI	KP
Max	1.5086	.7966	.9002
Min	.0283	.0090	.5100
Mean	.3649	.2447	.6206
Std. Dev	.2973	.2516	.1052
N	56	56	56

Sumber : Data olahan, 2019

Hasil analisis deskriptif yaitu nilai rata – rata *tax avoidance* dengan pengukuran CETR yakni 36,49%. CETR bernilai maksimum 150,86% yang menunjukkan nilai perusahaan yang memiliki tingkat *tax avoidance* paling rendah, sedangkan CETR bernilai minimum 2,83% yang menunjukkan tingkat *tax avoidance* paling tinggi. *Capital intensity* mempunyai nilai rata-rata 24,47% dengan nilai tertinggi 79,66% serta nilai terendah 0,90%. Kepemilikan saham pemerintah sebagai proksi dari koneksi politik bernilai rata-rata 62,06% dengan nilai maksimum 90,02% serta nilai minimum sebesar 51%.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum menganalisis pengujian hipotesis, analisis regresi linier sederhana, serta koefisien determinasi terdapat beberapa anggapan yang harus terpenuhi supaya tidak menghasilkan simpulan regresi yang bias, yaitu pengujian asumsi klasik seperti tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		TOTAL
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	4.7091
	Std. Deviation	2.61533
Most Extreme Differences	Absolute	.218
	Positive	.218
	Negative	-.154
Test Statistic		.218
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

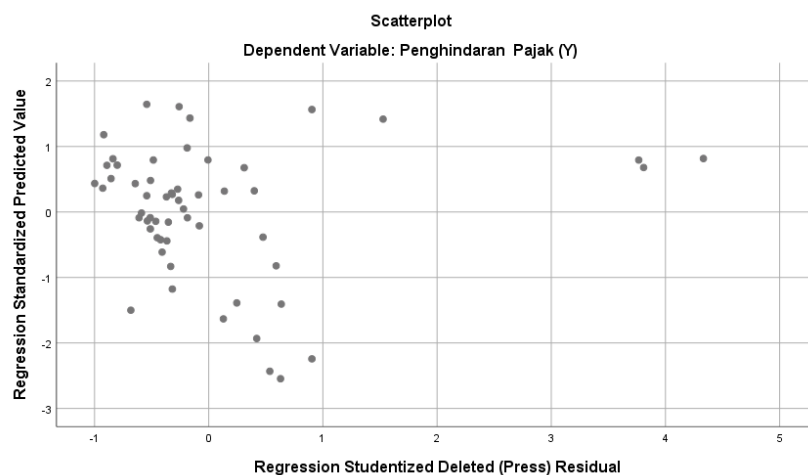
Sesuai tabel 2, signifikansi bernilai 0.200 berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan lebih besar dari 0.05. Nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan asumsi normalitas telah dipenuhi model regresi.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas  
 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Capital Intensity (X2)	.572	1.749
Koneksi Politik (X3)	.889	1.125

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sesuai yang terlihat pada tabel 3, semua variabel independent memiliki nilai *Tolerance* > 0.1 serta nilai VIF keseluruhan variabel bebas < 10. Maka kesimpulannya tidak terjadi multikolinieritas pada data tersebut.



**Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas guna mengkaji model regresi apakah ada perbedaan varian dari residual observasi satu ke observasi lainnya. Heterokedastisitas tidak terjadi pada

model regresi yang baik. Berdasar grafik di atas secara penyebaran titik – titik acak dan tidak merata. Maka kesimpulannya model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4** Hasil Uji Autokorelasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
	1

a. Predictors: (Constant), Corporate Risk (X4), Pengungkapan Corporate Social Responsibility (X1), Koneksi Politik (X3), Capital Intensity (X2)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil yang didapatkan, nilai *Durbin-Watson* senilai 1.744 untuk pengamatan yang berjumlah 56. Menurut Singgih Santoso (2014) apabila nilai tersebut berada diantara 1 s/d 3 maka pada model regresi tidak terjadi autokolerasi.

### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil analisis regresi linier sederhana guna melihat hubungan fungsional diantara *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Persamaan regresi tersajikan pada tabel 6.

**Tabel 5** Hasil analisis regresi linier *capital intensity* terhadap *tax avoidance*  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	T	Sig.
		B	Std. Error	d		
1	(Constant)	.372	.056		6.627	.000
	Capital Intensity (X2)	-.430	.161	-.635	-2.670	.002

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Melalui nilai *unstandardized coefficients* (B) persamaan regresi linier sederhana yang dibentuk sesuai pada tabel 6 adalah:

$$Y = 0.372 - 0.430X_2$$

Berdasarkan pada Tabel 6, dapat diketahui Konstanta (a) sebesar 0.372 menunjukkan jika perusahaan tidak memiliki *capital intensity* atau memiliki *capital intensity* yang sangat rendah maka *tax avoidance* tidak dilakukan perusahaan. Koefisien regresi (b) bernilai negatif -0.430 menandakan apabila *capital intensity* naik 1% maka akan menurunkan CETR -0.430%. Dengan demikian *capital intensity* yang semakin tinggi mengindikasikan *tax avoidance* yang perusahaan lakukan semakin tinggi. Hasil penelitian sesuai dengan Muzakki & Darsono (2015) yang menemukan *capital intensity* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*.

Hasil uji hipotesis pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance* yang didapatkan dari perbandingan t hitung dengan t table yaitu  $-2.670 < -2.005$ , sehingga dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan untuk menolak  $H_0$  dan  $H_a$  diterima. Hasil penelitian menandakan nilai t hitung -2.670 ada di daerah penolakan  $H_0$  yang mana dapat



disimpulkan secara signifikan *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian sesuai dengan Muzakki & Darsono (2015) dan Anindyka dkk. (2018) yang menyatakan *capital intensity* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*.

Setelah diuji serta terbukti *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, selanjutnya dihitung koefisien determinasi guna melihat seberapa besar pengaruh *capital intensity* secara parsial pada *tax avoidance*. Berdasarkan pengolahan data dihasilkan nilai koefisien determinasi *capital intensity* pada *tax avoidance* sebesar 40,3% di perusahaan BUMN di BEI tahun 2015 – 2018. Sementara sisanya ialah pengaruh variabel lain yang tidak diteliti.

### Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi linier sederhana guna melihat hubungan fungsional antara koneksi politik dengan *tax avoidance*. Persamaan regresi tersebut disajikan pada tabel 7:

**Tabel 6** Hasil analisis regresi linier koneksi politik terhadap *tax avoidance*  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.595	.240		2.479	.016
	Koneksi Politik (X3)	-.870	.381	-.531	-2.283	.006

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Melalui nilai *unstandardized coefficients* (B) pada tabel 7, terbentuk persamaan regresi linier sederhana yaitu:

$$Y = 0.595 - 0.870X_3$$

Konstanta (a) senilai 0.595 menunjukkan jika koneksi politik tidak dimiliki perusahaan atau koneksi politik yang dimiliki sangat rendah maka *tax avoidance* tidak dilakukan perusahaan. Koefisien regresi (b) bernilai negatif -0.870 menunjukkan apabila kepemilikan saham pemerintah naik 1% maka akan menurunkan CETR senilai -0.870%. Dengan demikian koneksi politik yang semakin tinggi dimiliki perusahaan mengindikasikan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi.

Hasil pengujian hipotesis pengaruh koneksi politik pada *tax avoidance* dari perbandingan t hitung dengan t table yaitu  $-2.283 < -2.005$ , jadi pada tingkat signifikansi 5% disimpulkan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Hasil ini menunjukkan nilai t hitung -2.283 ada di daerah penolakan  $H_0$ , maka secara signifikan koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan Tehupuring & Rossa (2016) serta Butje & Tjondro (2014) yang menemukan *tax avoidance* secara signifikan dipengaruhi oleh koneksi politik.

Setelah diuji dan terbukti bahwa secara signifikan koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*, kemudian koefisien determinasi dihitung guna melihat seberapa besar pengaruh secara parsial koneksi politik pada *tax avoidance*. Berdasarkan pengolahan data dihasilkan nilai koefisien determinasi koneksi politik pada *tax avoidance* sebesar 28,1% pada perusahaan BUMN di BEI tahun 2015 – 2018. Sementara sisanya ialah pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

## KESIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menemukan bahwa *capital intensity* dan koneksi politik berpengaruh signifikan secara parsial pada perusahaan BUMN periode 2015-2018. Secara signifikan *capital Intensity* mempengaruhi *tax avoidance* dengan besar kontribusi 40,3%. Hal ini menyatakan apabila *capital intensity* tidak dimiliki perusahaan atau *capital intensity* yang dimiliki sangat rendah maka *tax avoidance* cenderung tidak dilakukan perusahaan. Selain itu, apabila *capital intensity* yang dimiliki perusahaan semakin tinggi maka mengindikasikan *tax avoidance* yang perusahaan lakukan juga semakin tinggi. Secara signifikan koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance* dengan besar kontribusi 28,1%. Hal ini menyatakan apabila koneksi politik yang dimiliki sangat rendah maka *tax avoidance* cenderung tidak dilakukan perusahaan. Selain itu, apabila koneksi politik yang dimiliki perusahaan semakin tinggi maka kemungkinan perusahaan melaksanakan *tax avoidance* semakin tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Andhary, P. A. . (2017). PENGARUH PENGUNGKAPAN LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, PROFITABILITAS, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PADA AGRESIVITAS PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3).
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management* :, 5(1).
- Ardyansah, D. (2014). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, CAPITAL INTENSITY RATIO, PROFITABILITY, LEVERAGE, DAN SIZE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4). <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1). <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2).
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Mardiasmo. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, kepemilikan Institusional, sales growth, serta Leverage terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor barang kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. *Journal*

- Perpajakan*, 8(1).
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3).
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(03).
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.7763/ijtef.2010.v1.34>
- Purwanggono, E., & Rohman, A. (2015). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3).
- Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sukartha, I. G. H. D. dan I. M. (2018). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1).
- Suryowati, E. (2016). Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura. *Kompas.Com*.
- Tehrani, H., Cornett, M. M., Marcus, A. J., & Saunders, A. (2011). Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.886142>
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. In *Salemba Empat* (Issue 1).
- Widodo, F. M. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak (Tax Avoidance) (Pada perusahaan Manufaktur di Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(1).
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Capital Intensity, Preferensi Risiko Eksekutif, DAN Corporate Social Responsibility Pada Penghindaran Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.